



Media: Seputar Indonesia

Hari: Rabu

Tanggal: 31 Mei 2017

Halaman: 15

POLEMIK MENARA TELEKOMUNIKASI ILEGAL

Raperda Tower Dibawa ke Rapat Paripurna

YOGYAKARTA – Mayoritas fraksi di DPRD Kota Yogyakarta sepakat membawa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian dan Penataan Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik ke rapat paripurna.

Pimpinan dewan secepatnya bakal menggelar rapat pimpinan untuk penjadwalan rapat paripurna.

"Sebenarnya masih ada dinamika, tapi akhirnya disepakati diserahkan ke rapim (rapat pimpinan) dan arahnya dibawa ke paripurna," kata Wakil Ketua I DPRD Kota Yogyakarta M Ali Fahmi seusai rapat konsultasi antara pimpinan dewan dengan pimpinan seluruh fraksi, kemarin.

Menurutnya, dalam rapim bakal ditentukan jadwal rapat paripurna beragenda pengesahan Raperda Menara Telekomunikasi. Dinamika yang terjadi di internal dewan hingga kemarin diakui kemungkinan besar bakal bergulir lagi di rapat paripurna.

Namun, politikus PAN ini optimistis pengesahan raperda tak akan tertunda lagi. Meskipun dua kali paripurna pengesahan batal akibat boikot sejumlah fraksi yang menuntut adanya penetapan seluruh menara ilegal terlebih dulu.

Menyangkut wacana pengembalian naskah raperda ke Komisi C selaku pihak pemrakarsa, menurut Fahmi, hal itu tidak akan dilakukan. Hal ini lanjut dari sisi substansi, seluruh fraksi sudah tak memper-

soalkan. Apalagi naskah raperda juga sudah mendapatkan fasilitasi serta rekomendasi dari gubernur DIY.

"Nanti kita lihat dinamika nyadi paripurna. Kalau darimateri raperda tak ada persoalan, dinamika muncul karena ada masukan-masukan penetapan (menara ilegal) dulu. Tapi paripurna ada mekanisme, dilihat kuorum tidak, apakah nanti harus voting, atau seperti apa," sebutnya.

Ketua Fraksi PKS Nasrul Khairi mengungkapkan, mayoritas fraksi memiliki sikap sama untuk segera mengesahkan Raperda Menara Telekomunikasi. Setelah disahkan, langsung ditindaklanjuti dengan pembentukan tim pengawas guna mengawal komitmen penetapan yang dijanjikan Pemkot Yogyakarta.

"Memang masih ada yang keberatan, tapi itu nanti disampaikan saat sidang paripurna. Sikap politik tersebut tetap dilindungi dan akan diputuskan dalam paripurna," katanya.

Wakil Ketua Fraksi PDIP Fokki Ardiyanto mengatakan, hak pimpinan dewan untuk memutuskan polemik menara telekomunikasi dibawa ke paripurna. Namun, dia menegaskan setiap anggota dewan juga memiliki hak yang melekat.

"Kami juga berhak untuk menerima raperda itu disahkan atau menolaknya. Nanti kita lihat di paripurna," ujarnya.

• **ristu hanafi**

| Negatif | Amat Segera | Tidak Segera | Untuk Diketahui |

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 08 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005